



Hubungan Diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam Pada Masa Presiden Suharto & Sultan Hassanal Bolkiah, 1984-1998

Ahmad Musyalen Firdaus^{1*}, Nurzengky Ibrahim¹, Kurniawati¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: musyalen@gmail.com; nurzengkyibrahim@unj.ac.id; kurniawati@unj.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 06-11-2023, Revised: 06-12-2023, Accepted: 09-12-2023, Published: 30-12-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam periode 1984-1998. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam pengumpulan sumber penulis menggunakan sumber-sumber dari surat kabar sejawan dan buku-buku sumber yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia dan Brunei Darussalam telah memiliki hubungan baik sejak masa kerajaan di Nusantara. Salah satu bukti hubungan baik tersebut adalah adanya kekerabatan antara keluarga Kerajaan Brunei dengan Kerajaan Majapahit. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia dengan Brunei memiliki hubungan dingin akibat perbedaan pandangan politik antara Presiden Sukarno dengan Sultan Brunei Sir Omar Ali Saifuddin III terhadap gerakan Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang dipimpin oleh A.M. Azahari. Pada masa Presiden Suharto, Indonesia memulai kembali hubungan diplomatik dengan Brunei Darussalam yang dimulai pada tahun 1981 hingga hubungan diplomatik yang resmi pada Januari 1984. Dalam perkembangannya hingga Mei 1998, hubungan diplomatik Indonesia dengan Brunei Darussalam berjalan baik dengan semangat persahabatan yang tinggi. Hal ini dilihat dengan beragam kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, Pendidikan hingga pariwisata. Bidang politik dan ekonomi merupakan bidang yang paling berkesan dalam hubungan diplomatik antara kedua negara. Salah satunya adalah Brunei Darussalam memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Indonesia pada tahun 1987.

Kata Kunci:

Brunei Darussalam; hubungan diplomatik; Indonesia; Presiden Suharto; Sultan Hassanal Bolkiah

Abstract

This research aims to explain how Indonesia's Diplomatic Relations with Brunei Darussalam developed in the 1984-1998 period. The research method used is a historical method consisting of heuristics, source criticism or verification, interpretation and historiography. In collecting sources, the author uses sources from contemporary newspapers and source books related to the discussion. The results of this research are that Indonesia and Brunei Darussalam have had good relations since the time of the kingdoms in the archipelago. One proof of this good relationship is the kinship between the Brunei Royal family and the Majapahit Kingdom. During the Guided Democracy era, Indonesia and Brunei had cold relations due to differences in political views between President Sukarno and the Sultan of Brunei Sir Omar Ali Saifuddin III regarding the movement for the Unitary State of North Kalimantan led by A.M. Azahari. During President Suharto's time, Indonesia restarted

diplomatic relations with Brunei Darussalam which began in 1981 until official diplomatic relations in January 1984. In its development until May 1998, Indonesia's diplomatic relations with Brunei Darussalam went well with a high spirit of friendship. This can be seen through various collaborations in various fields such as politics, economics, education and tourism. The political and economic fields are the most impressive areas in diplomatic relations between the two countries. One of them is that Brunei Darussalam provided an interest-free loan to Indonesia in 1987.

Keywords:

Brunei Darussalam; diplomatic relations; Indonesia; President Suharto; Sultan Hassanah Bolkiah



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Secara umum, Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan dalam bahasa (Bahasa Melayu & Bahasa Indonesia), ras (Bangsa Melayu) dan agama (mayoritas beragama Islam). Dalam perjalanan sejarah, Kerajaan Brunei memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selain membayar upeti (kepada Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit) dan perdagangan antar kerajaan, dilakukan pula pernikahan antar kerajaan. Berdasarkan penelitian Ketua Pusat Sejarah Brunei Darussalam di tahun 1993, pada masa Kerajaan Majapahit Sultan Maulana Abdul Ishak dari Brunei menikahi Putri Sekardadu yang merupakan cicit Raja Hayam Wuruk dan memiliki anak yakni Sunan Giri (Tt, 1993). Kemudian Sultan Brunei Abdul Kahar menikahi Puteri Mataram dan Sultan Abdul Jalilul Akbar Ibnu Sultan Hassan menikahi Puteri Gresik. Berdasarkan silsilah tersebut, Kerajaan Brunei merupakan saudara serumpun Bangsa Indonesia.

Rasa persaudaraan ini semakin menguat setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga perlawanannya melawan Belanda sampai tahun 1949. Usaha-usaha Indonesia meraih dan mempertahankan kemerdekaannya sangat dikagumi dan menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah yang masih dipengaruhi Britania Raya kala itu (Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei dan Borneo Utara). Salah satu tokoh yang terinspirasi dengan perjuangan Indonesia adalah Ya'akob Ibrahim, Ahmad Boestaman dan A.M. Azahari Mahmud (Brackman, 1966). Pada awal dekade 1960an, Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno dengan kebijakan Manipol-USDEK sangat mendukung kemerdekaan negara-negara yang masih terbelenggu dalam penjajahan (khususnya di Asia Tenggara) dan tentunya memiliki semangat Revolusioner yang tinggi pula. Manipol merupakan singkatan dari Manifesto Politik Republik Indonesia yang berasal dari pidato kenegaraan Presiden RI pada 17 Agustus 1959 sedangkan USDEK merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

Pada hari Sabtu 8 Desember 1962 terjadi sebuah "Pemberontakan" di Brunei yang dilakukan oleh Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) dan dipimpin oleh ketua Parti Ra'ayat Brunei (PRB) A.M. Azahari. Di Filipina, Azahari memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) dengan dirinya sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan

Menteri Pertahanan dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Sir Omar Ali Saifuddin III sebagai Kepala Negara Konstitusional dan Parlemerter. Terlepas dari penolakan Sultan Omar Ali Saifuddin III terhadap NKKU hingga pemberantasannya yang dibantu tentara Britania Raya serta polisi dari Singapura dan Malaya, Indonesia yang belum memiliki hubungan resmi dengan Brunei karena wilayah Protektorat Britania Raya tetap pada pendiriannya untuk mendukung “Perlawanan Brunei” yang dipimpin Azahari.

Presiden Sukarno mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi di Kalimantan Utara tersebut memiliki keterkaitan dengan gerakan *New Emerging Forces* atau NEFO dan penolakan “rakyat” Kalimantan Utara terhadap rancangan Federasi Malaysia (Mingguan Djaja, 1962). NEFO merupakan istilah yang digunakan Presiden Sukarno dalam menyebutkan negara-negara yang baru merdeka dan memiliki semangat progresif dalam membangun dunia baru yang adil dan Makmur tanpa imperialisme dan kolonialisme. Dukungan kemudian berdatangan dari partai politik hingga organisasi masyarakat Indonesia. Tindakan-tindakan yang dilakukan Indonesia diantaranya mendirikan Panitia Nasional Setiakawanan Rakjat Indonesia-Kalimantan Utara, melakukan pemboikotan oleh para buruh di perusahaan Britania Raya di Indonesia dan mengirimkan Sukarelawan-Sukarelawati ketika berlangsungnya Konfrontasi Malaysia (1963-1966). Dengan dukungan yang begitu besar kepada NKKU, Indonesia belum juga mengakui kedaulatan NKKU hingga berakhirnya Konfrontasi Malaysia pada tahun 1966. Dampak daripada kebijakan Indonesia terhadap Brunei dibawah pimpinan Sultan Omar Ali Saifuddin III adalah hubungan yang dingin secara non-pemerintah. Pemerintah Brunei Darussalam melarang Warga Negara Indonesia mengunjungi Brunei dan paspor Brunei (menggunakan paspor Britania Raya) tidak berlaku di Indonesia (Anwar, 1988).

Tahun 1967 menjadi awal perubahan dari kedua negara. Di Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967, berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memberhentikan Sukarno sebagai Presiden Indonesia dan digantikan oleh May. Jend. Suharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Di Brunei pada tanggal 4 Oktober 1967 Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Sir Omar Ali Saifuddin III mengumumkan untuk turun takhta sebagai Sultan Brunei dan digantikan oleh anak sulungnya yakni Yang Teramat Mulia Duli Pengiran Muda Mahkota Hassanal Bolkiah. Pada tanggal 5 Oktober 1967 dalam usia 22 tahun telah diangkat menjadi Sultan Brunei ke 29 yakni Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzudin Waddaulah.

Dalam perkembangannya, kedua pemimpin ini memiliki kesamaan dalam memandang politik luar negeri, yakni menginginkan pelaksanaan politik yang damai dan mengorientasikan terhadap pembangunan dalam negeri. Dalam menjalankan politik luar negeri, Presiden Suharto mendukung langkah-langkah yang dilakukan Brunei untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984, Presiden Suharto dan Sultan Hassanal Bolkiah bersama-sama meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara dengan baik. Selain dalam taraf negara, hubungan baik ini juga terlihat dalam hubungan pribadi antara kedua pemimpin hingga meninggalnya Bapak Suharto pada tahun 2008.

Dengan perkembangan yang telah disebutkan diatas menjadi dasar penulis untuk mengkaji bagaimana hubungan Presiden Suharto dan Sultan Hassanal Bolkiah dalam hubungan diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam. Melalui hubungan

internasional, penulis akan melihat bagaimana peran kedua pemimpin negara dalam membawa hubungan kedua negara menuju hubungan persahabatan yang baik. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sejarah khususnya pembahasan hubungan diplomatik Indonesia dengan Brunei Darussalam dan sejarah politik luar negeri Indonesia. selain itu, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi pembaca sejarah terkait dengan pembahasan yang disajikan.

Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sejarah. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam proses pengumpulan sumber (heuristik), penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan pers surat kabar. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber-sumber pers surat kabar Indonesia sebagai sumber utama dalam mengetahui informasi yang terkait. Alasan dipilihnya pers surat kabar karena pers memiliki fungsi informasi, koreksi dan mediasi (Sumadiria, 2017). Dengan ketiga fungsi tersebut meyakinkan penulis mengenai informasi-informasi yang dimuat dalam surat kabar. Penggunaan surat kabar juga disesuaikan dengan batasan waktu yang dibahas dan waktu penerbitan pula sesuai dengan tanggal dan waktu kejadian. Sumber lainnya yang digunakan adalah buku-buku dan artikel ilmiah yang menulis peristiwa yang terkait dengan pembahasan penulis. Penelitian ini akan ditulis menggunakan metode penulisan deskriptif-historis. Dengan metode deskriptif historis, penulis dapat meneliti menggunakan sumber-sumber sejarah yang ada dan dapat menjelaskan secara kronologis.

Hubungan Indonesia-Brunei Darussalam Tahun 1981

Pada masa kepemimpinan Presiden Suharto, Indonesia memiliki pendirian untuk memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang masih terbelenggu dalam “penjajahan”, termasuk dalam hal ini Negara Brunei. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Brunei, Indonesia menandatangani Resolusi Kemerdekaan Brunei di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1976 (Karundeng, 1976). Resolusi tersebut menginginkan agar Brunei diberikan kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri. Resolusi mendapat dukungan sebanyak 119 anggota PBB dan pada keputusan Komite Dekolonialisasi Majelis Umum PBB pada 11 November 1977 resolusi terkait Brunei disetujui sebanyak 117 suara dan 15 abstain. Dalam hal ini, Presiden Suharto juga menyampaikan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Brunei dalam menuju kemerdekaannya.

Dengan adanya desakan negara-negara internasional terhadap Brunei, pada tanggal 7 Januari 1979 disepakati antara Britania Raya yang diwakili Menteri Negara Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran Lord Goronwy Robert dengan Brunei diwakili Sultan Sir Muda Hassanal Bolkiah) bahwa pada akhir tahun 1983 Brunei akan mendapatkan tanggungjawab kembali secara penuh dalam mengatur hubungan luar negeri dan pertahanan serta keamanan Brunei dari Britania Raya. Dengan demikian Brunei akan menjadi negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh.

Dalam mempersiapkan kemerdekaannya, Brunei mulai memasuki percaturan politik internasional. Salah satunya adalah ingin bergabung dalam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Selaku anggota ASEAN, Indonesia mendukung rencana tersebut asalkan Brunei mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Rencana

tersebut bahkan membuat Britania Raya senang dan bahagia apabila Brunei bergabung dalam ASEAN. Akhirnya pada bulan Juni 1981 Brunei menjadi anggota pengamat ASEAN. Selain berusaha bergabung dalam ASEAN, Sultan Hassanal Bolkiah melakukan kunjungan kenegaraan ke negara-negara tetangga dalam mempersiapkan hubungan diplomatik Brunei setelah kemerdekaan, termasuk dalam hal ini Indonesia.

Pada tanggal 9 April 1981 Sultan Hassanal Bolkiah melakukan kunjungan tidak resmi ke Jakarta, Indonesia. Sultan Bolkiah bertemu langsung dengan Presiden Suharto, Wakil Presiden (Wapres) Adam Malik dan Menteri Luar Negeri (Menlu) M. Panggabean. Adapun tujuan Sultan Hassanal Bolkiah ke Jakarta adalah ingin meningkatkan kerjasama dalam mempersiapkan kemerdekaan Brunei Darussalam pada tahun 1983 mendatang. Selain itu, kunjungan ini menjalin kerjasama dan persahabatan Brunei Darussalam dengan Indonesia (Kompas, 1981). Menlu Panggabean mewakili Indonesia menyambut baik keinginan Brunei dan senantiasa akan memelihara hubungan bertetangga yang baik dengan Brunei.

Pertemuan antara Presiden Suharto dengan Sultan Hassanal Bolkiah membawa keyakinan bagi Sultan Hassanal Bolkiah bahwa Indonesia mendukung keanggotaan Brunei Darussalam di ASEAN dan Presiden Suharto sendiri akan menjamin dukungan tersebut. Kemudian pemerintah Indonesia membalas kunjungan ini dengan melakukan kunjungan ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam oleh Menlu Mochtar Kusumaatmadja pada bulan Agustus 1982 sehingga rasa kepercayaan Brunei Darussalam kepada Indonesia juga terlihat menjelang kemerdekaannya yang akan diproklamasikan pada 1 Januari 1984.

Menjelang akhir bulan Desember 1983 Indonesia telah mendirikan Kantor Penghubung *Liaison Office* di Hotel Sheraton Utama, Bandar Seri Begawan. Kondisi kantor menjelang proklamasi menjadi sibuk karena persiapan Brunei bergabung dalam ASEAN. Bahkan tiga hari sebelum proklamasi, Kantor Penghubung Indonesia di Brunei Darussalam boleh mengibarkan bendera merah-putih, padahal hanya Komisaris Tinggi Inggris dan negara-negara tertentu dalam Persemakmuran yang dapat mengibarkan bendera mereka. Pengibaran bendera Indonesia mendapat izin langsung Sultan Hassanal Bolkiah. Imigrasi pemerintah Indonesia juga memberikan izin masuk kepada rakyat Brunei selama dua bulan visa walaupun menggunakan paspor Britania Raya dengan syarat dibuat oleh Kantor Imigrasi Brunei. Indonesia juga telah menetapkan Zuwir Djamal sebagai calon Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam dan kemudian dilantik pada tahun 1984.

Hubungan Diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam Tahun 1984

Proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam telah dibacakan pada pukul 12.01 waktu Brunei pada tanggal 1 Januari 1984 yang menandakan kedaulatan penuh Brunei Darussalam sudah dipegang kembali dari Britania Raya. Pada tanggal 18 Februari 1984 Pengiran Dato Paduka H. Jaludin telah ditetapkan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Brunei Darussalam untuk Indonesia. Dengan adanya Duta Besar (Dubes) yang ditetapkan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam maka kedua negara resmi memiliki hubungan diplomatik yang sah.

Sebagai bentuk hubungan diplomatik yang ada, Kerajaan Brunei Darussalam mengundang Presiden Suharto untuk menghadiri perayaan Hari Kebangsaan Brunei Darussalam pada tanggal 23 Februari 1984. Undangan tersebut menjadi kunjungan

perdana Presiden Suharto ke Brunei Darussalam. Selain Presiden Indonesia, beberapa perwakilan negara lain seperti Pangeran Charles dari Britania Raya, Yang Dipertuan Agong Malaysia, Sultan Johor dan PM. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohammad dan PM. Lee Kuan Yew dari Singapura juga ikut diundang dalam acara ini.

Pada tanggal 22 Oktober 1984 Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah beserta rombongan kembali melakukan kunjungan resmi ke Jakarta sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Suharto dalam Perayaan Hari Kebangsaan Brunei Darussalam. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi kedua Sultan Hassanal Bolkiah ke negara-negara ASEAN dan sekaligus kunjungan perdana setelah Brunei Darussalam merdeka. Dalam rombongan Sultan Bolkiah turut hadir Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pengiran Muda Jefri Bolkiah dan Menteri Pelajaran & Kesehatan Haji Abdul Aziz. Pada tanggal 23 Oktober 1984 Yang Dipertuan Negara Brunei Sultan Hassanal Bolkiah melakukan pembicaraan resmi dengan Presiden Suharto di Istana Merdeka. Pembicaraan tersebut bersamaan dengan pembicaraan antara Menteri Pengiran Jefri Bolkiah dengan Menteri Pemuda & Olahraga Abdul Gofur dan Menteri Awang Haji Abdul Aziz dengan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nugroho Notosusanto di Istana Merdeka pula.

Pembicaraan antara Presiden Suharto dengan Sultan Hassanal Bolkiah menekankan dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam hal politik, Sultan Hassanal Bolkiah mendukung prinsip-prinsip ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) di Asia Tenggara. Presiden Suharto juga menjelaskan posisi Indonesia dalam menjalankan persahabatan dengan negara lain dengan prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri urusan internalnya (R-13, 1984). Indonesia juga tidak akan bersifat ekspansionis ataupun mengganggu kemerdekaan negara lain.

Dalam pembicaraan mengenai ekonomi difokuskan dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan. Indonesia membuka kesempatan apabila Brunei Darussalam berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Sultan Hassanal Bolkiah setuju dengan Presiden Suharto dalam hal kerjasama bilateral yang menguntungkan ini. Pembicaraan berlanjut antara kedua Menteri terkait informasi mengenai keadaan masing-masing negara dan Brunei Darussalam dalam hal ini tertarik untuk mempelajari hal-hal yang telah dicapai Indonesia dalam bidang politik maupun ekonomi (Antara, 1984a, 1984b).

Selain membahas hubungan politik dan ekonomi, sebagai bentuk persaudaraan dan persahabatan, Sultan Hassanal Bolkiah dan rombongan juga mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah dan Teater IMAX Keong Mas. Sultan Hassanal Bolkiah dan rombongan juga melakukan kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengunjungi Akademi ABRI Magelang, Candi Borobudur dan Kraton Yogyakarta. Sultan Bolkiah juga bertemu dengan KGPH Mangkubumi, SH, Wakil Gubernur Sri Paku Alam VIII dan menyempatkan menonton pertunjukan wayang oleh Ki Cermosarjono (R-8, 1984).

Pertemuan Presiden Suharto dengan Sultan Hassanal Bolkiah pada tahun 1984 menjadi permulaan baru hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Hadirnya Presiden Suharto dalam perayaan Hari Kebangsaan Brunei Darussalam pada Februari 1984 menunjukkan turut bersuka citanya Indonesia dengan kemerdekaan Brunei Darussalam dari Britania Raya. Kunjungan resmi Sultan Hassanal Bolkiah ke Indonesia pada Oktober 1984 menjadi awal hubungan diplomatik yang resmi bagi kedua negara (Antara & Reuter, 1984).

Hubungan Diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam Tahun 1987

Pada tanggal 10 September 1987 Duli Yang Maha Mulia Sultan Hassanal Bolkiah bersama Permaisuri Istri Hajjah Mariam dan rombongan tiba di Jakarta dalam melakukan kunjungan tidak resmi di Indonesia yang bertempat di Ruang Jepara, Istana Merdeka. Meskipun sebuah kunjungan yang tidak resmi, tetapi hal penting dalam pertemuan ini adalah Pemerintah Brunei Darussalam bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar US\$ 100 juta tanpa bunga kepada Indonesia (Antara, 1987b). Pengembalian pinjaman tersebut dapat dilakukan selama 25 tahun dengan masa tenggang 7 tahun. Brunei juga menanamkan modal di usaha pabrik semen di Cibinong, Jawa Barat, Hotel Nuasa Dua Bali dan Proyek Alumina di Bintan, Riau. Selain proyek ekonomi, Brunei juga akan membantu pembangunan proyek infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia. Presiden Suharto atas nama rakyat Indonesia menyambut baik rencana tersebut (Angkatan Bersenjata, 1987).



Gambar 1. Berita pertemuan Sultan Hassanal Bolkiah dengan Presiden Suharto di Jakarta dan bantuan pinjaman kepada Indonesia yang diberitakan The Straits Times, Singapura pada September 1987.

Pada tanggal 11 September 1987 Sultan Hassanal Bolkiah beserta rombongan mengunjungi PT. PAL (Penataran Angkatan Laut) dan Armada TNI Angkatan Laut (AL) Wilayah Timur, Surabaya. Kunjungan Sultan Bolkiah ke PT. PAL didampingi Menteri Riset dan Teknologi Baharuddin Jusuf Habibie dan kunjungan ke Armada TNI-AL Wilayah Timur didampingi Pangab L.B. Moerdani. Secara terpisah Istri Sultan Hassanal Bolkiah mengunjungi Akademi TNI-AL (AAL) Budimoro, Surabaya. Ketika mengunjungi Armada Wilayah Timur, Sultan Hassanal Bolkiah dianugerahkan brevet "Hiu Kencana oleh Pangab L.B. Moerdani. Dari Surabaya, Jawa Timur Sultan Hassanal Bolkiah beserta rombongan mengunjungi Denpasar,

Bali yaitu mengunjungi Pusat Kesenian Bali di Desa Celuk, Gianyar dan Bengkel Kerja Pemahat Ida Bagus Tilem di Desa Mas (Antara, 1987a).

Kunjungan tidak resmi Sultan Hassanal Bolkiah ke Indonesia pada September 1987 menunjukkan kepercayaan Brunei Darussalam terhadap Indonesia dan turut berpartisipasi Brunei kepada pembangunan Indonesia. Walaupun dalam perkembangan partisipasi Indonesia dalam perdagangan di Brunei Darussalam meningkat secara perlahan karena kalah saing dengan Malaysia, Singapura dan Thailand terdapat beberapa produk Indonesia yang diminati rakyat Brunei. Salah satu produk tersebut adalah Mobil Kijang. Alasan Mobil Kijang diminati adalah ketangguhan mesin dan mudahnya perawatan (Luhulima & Setiadi, 1989). Tenaga Kerja Indonesia di Brunei juga diminati karena kesamaan bahasa antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Indonesia dan agama yang mayoritas beragama Islam, walaupun terdapat kelemahan dalam kemampuan dan tingkat pekerjaan yang hanya sebatas pembantu rumah tangga ataupun pekerja konstruksi.

Hubungan Diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam Tahun 1998

Pada tanggal 5 Februari 1998 Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah mengunjungi Jakarta. Kunjungan Sultan Hassanal Bolkiah ini didasari pada peristiwa dimana sejak tahun 1997 Indonesia terkena dampak krisis ekonomi, sehingga dalam menghadapi krisis tersebut Indonesia meminta bantuan *International Monetary Fund* (IMF) sebesar US\$ 23 Miliar. Sebagai kelengkapan paket bantuan IMF, maka Sultan Hassanal Bolkiah memberikan bantuan *stand by loan* sebesar US\$ 1.2 Miliar (Media Indonesia, 1998). Selain kelengkapan bantuan IMF, Sultan Hassanal Bolkiah sendiri turut prihatin dengan krisis ekonomi yang melanda negara-negara sahabatnya seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura (Susan Lim, 1997).



Gambar 2. Berita pertemuan Sultan Hassanal Bolkiah dengan Presiden Suharto di Jakarta pada 5 Februari 1998 dalam surat kabar Kompas.

Sultan Hassanal Bolkiah kembali mengunjungi Jakarta pada tanggal 25 Februari 1998. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan singkat karena kunjungan

ini hanya untuk meresmikan Gedung Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan Gerakan Non-Blik di Kemayoran, Jakarta Pusat bersama Presiden Suharto. Peresmian gedung kerjasama teknik tersebut merupakan bentuk keikutsertaan Sultan Bolkuh atas ajakan Presiden Suharto pada Oktober 1992 untuk membantu Kerjasama Selatan-Selatan (Kompas, 1998; Pelita, 1992).

Pertemuan antara Presiden Suharto dengan Sultan Hassanul Bolkuh di Jakarta pada tahun 1998 merupakan pertemuan terakhir Sultan Bolkuh dengan Presiden Indonesia Suharto. Setelah bulan Februari 1998, keadaan perekonomian Indonesia semakin memburuk sehingga aksi demonstrasi mahasiswa semakin gencar. Bahkan pada bulan Mei 1998 menimbulkan konflik-konflik sosial di beberapa kota besar Indonesia yang sarat akan kebencian terhadap suatu etnis dan agama. Melihat perkembangan tersebut, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia dan digantikan oleh Wapres B.J. Habibie.

Dampak Hubungan Diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam, 1984-1998

Berdasarkan kepada pembicaraan antara Presiden Suharto dengan Sultan Hassanul Bolkuh, terdapat beberapa dampak yang berpengaruh dalam hubungan diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam. Dampak yang berpengaruh terdapat dalam bidang politik, ekonomi dan pariwisata.

a. Dalam Bidang Politik

Dalam bidang politik, terdapat kerjasama yang dibangun antara Indonesia dengan Brunei sebelum 1984. Dalam pertemuan tidak resmi antara Presiden Suharto dengan Sultan Hassanul Bolkuh di Jakarta pada April 1981 Indonesia memberikan dukungan kepada Brunei untuk dapat bergabung dalam ASEAN setelah resmi merdeka. Selain itu, pertemuan tersebut meyakinkan Brunei bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat dipercaya dan bersedia berhubungan baik dengan Brunei. Dalam kunjungan resmi Sultan Hassanul Bolkuh ke Jakarta pada Oktober 1984, Presiden Suharto menekankan kembali pendirian Indonesia yang akan menjalankan persahabatan yang tulus dengan Brunei Darussalam dan tidak akan memiliki keinginan untuk mengekspansi kekuasaan ke Brunei Darussalam.

Komitmen untuk menjalankan hubungan persahabatan antara dua negara juga berkesan dalam hubungan pribadi antara Presiden Suharto dengan Sultan Hassanul Bolkuh. Hal ini terlihat dengan pemerintah Indonesia sering diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun Sultan Hassanul Bolkuh. Perwakilan Indonesia yang pernah menghadiri pesta ulang tahun Sultan adalah Panglima ABRI Benny Moerdani dan Wakil Presiden Try Sutrisno. Pada acara ulang tahun Sultan Hassanul Bolkuh tanggal 15 Juli 1994, Menteri Riset & Teknologi B.J. Habibie dan Menteri Keamanan & Pertahanan Edi Suradjat menjadi perwakilan pemerintah Indonesia. Melalui Menristek Habibie, Presiden Suharto memberikan hadiah berupa Senapan Serbu (SS) 1 berlapis emas buatan PT. PINDAD beserta peluru kepada Sultan Hassanul Bolkuh (Republika, 1994). Sultan Hassanul Bolkuh menerima hadiah dengan senang hati dan berterima kasih. Kemudian, Sultan Bolkuh memberikan kepingan mata uang sebagai ganti hadiah yang diberikan.

Selain itu, kedua pemimpin negara pernah saling mengundang untuk menghadiri kegiatan yang bersifat kekeluargaan. Pada tanggal 2 Agustus 1989, Presiden Suharto bersama Ibu Tien Suharto dan rombongan memenuhi undangan

Sultan Hassanal Bolkiah untuk menghadiri upacara “berkhatan” Pengiran Muda Al Muhtadee Billah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Dalam upacara berkhatan pula, Presiden Suharto mendapat kesempatan pertama untuk memberi selamat dan “menepung-tawari” kepada putra Sultan Hassanal Bolkiah yang berkhatan. Ketika Ibu Tien Suharto meninggal dunia pada April 1996, Sultan Hassanal Bolkiah turut hadir melayat (Hendrowinoto, 2015). Pada bulan November 1997, Sultan Hassanal Bolkiah menghadiri doa bersama atau tahlilan untuk mendoakan Almarhumah Ibu Tien Suharto.

b. Dalam Bidang Pariwisata

Dalam bidang pariwisata, kerjasama secara tidak langsung sudah terjalin dengan adanya rute penerbangan Royal Brunei Airlines dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan (pulang-pergi) pada Januari 1984. Tujuan wisata Jakarta dan Denpasar juga menjadi salah satu destinasi yang umum dan digemari rakyat Brunei Darussalam. Namun terdapat titik peningkatan setelah kunjungan tidak resmi Sultan Hassanal Bolkiah dan rombongan ke Pulau Bali pada September 1987. Sultan Hassanal Bolkiah mengagumi keindahan alam dan kebudayaan Pulau Bali. Dengan testimoni Sultan Bolkiah secara tidak langsung meningkatkan minat rakyat Brunei Darussalam untuk berwisata ke Indonesia.

Pada bulan Maret 1988 Tim Pariwisata Brunei melakukan survey di beberapa tujuan destinasi wisata di Indonesia seperti Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara dan Tana Toraja. Pada tanggal 2-5 Maret 1988 Tim Pariwisata Brunei melakukan survey ke Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Bagi Tim Brunei, Tana Toraja memiliki wisata budaya yang menakjubkan seperti tradisi pemakaman dan kuburan batu. Di Sulawesi Selatan juga pihak Brunei tertarik dengan Bugis Islamic Tour, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Persamaan budaya dan banyaknya keturunan Bugis di Brunei menjadi daya Tarik tersendiri untuk Bugis Islamic Tour.

Dalam memudahkan wisatawan Brunei menuju destinasi wisata, Tim Pariwisata Brunei mengajukan permintaan kepada maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (Antara, 1988b). Pada bulan April 1988 Merpati Nusantara Airlines meresmikan rute penerbangan Bandar Seri Begawan-Balikpapan menggunakan pesawat Fokker F-28 dengan frekuensi 2x seminggu. Dengan kehadiran para wisatawan Brunei Darussalam ke Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia dalam bidang pariwisata. Untuk kenyamanan para wisatawan pula Indonesia perlu meningkatkan kualitas maupun infrastruktur. Khusus kepada wisatawan Brunei, Indonesia memiliki pesaing yakni Taiwan dan Singapura yang menjadi salah satu destinasi utama Brunei Darussalam ketika ke luar negeri.

c. Dalam Bidang Ekonomi

Berdasarkan pertemuan antar kedua pemimpin, bidang ekonomi yang memiliki dampak langsung adalah investasi. Dalam bidang investasi, pada bulan September 1987 Brunei Darussalam bersedia menanamkan modal di pabrik semen di Cibinong, Jawa Barat, Hotel Nuasa Dua, Bali dan Proyek Alumina di Bintan, Riau. Pemerintah Brunei Darussalam juga akan membantu pembangunan proyek infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia. bantuan tersebut dapat terlihat dengan pemberian pinjaman tanpa bunga kepada Indonesia sebesar US\$ 100 Juta. Pinjaman juga diberikan Sultan Hassanal Bolkiah sebesar US\$ 1.2 Miliar pada

Februari 1998. Walaupun pinjaman tersebut merupakan bagian dari bantuan IMF, Sultan Hassanal Bolkiah sendiri turut prihatin dengan kondisi perekonomian Indonesia kala itu bahkan menyatakan akan membantu negara-negara yang terdampak Krisis Moneter seperti Indonesia. Sehingga Januari 1998, kurs mata uang Rupiah kepada Dollar Amerika Serikat senilai Rp. 10.100,00 dengan kemerosotan nilai riil sebesar -75,92%. Jumlah tersebut semakin meningkat hingga Mei 1998 (Rtr, 1998).

Bidang ekonomi yang terdampak dari hubungan hangat Indonesia dengan Brunei Darussalam adalah perdagangan. Hingga pertengahan dekade 1990, Indonesia berusaha bertahan dalam perdagangan Brunei Darussalam dengan menjual beberapa komoditas seperti bahan pangan, bahan bangunan, bahan tekstil, pakaian jadi dan hasil kerajinan. Indonesia juga mengimpor beberapa komoditi dari Brunei seperti kapas, besi dan logam bekas. Dalam persaingan dagang di Brunei Darussalam, Indonesia berhadapan dengan Malaysia dan Thailand yang merupakan “partner” dagang Brunei yang sudah cukup lama bergadang. Selain harus bersaing dengan Malaysia dan Thailand, Indonesia perlu sadari bahwa jumlah konsumen di Brunei adalah sedikit sehingga Indonesia tidak bisa untung besar dalam waktu singkat dan perlu dapat bertahan dalam pasar mereka. Terdapat pula beberapa produk buatan Indonesia yang perlu dibanggakan karena menarik minat Brunei Darussalam untuk membelinya seperti Pesawat CN-235 dan Mobil Toyota Kijang Komando & Super (Kompas, 1989; Republika, 1997).

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BILATERAL R.I. - BRUNEI DARUSSALAM 1984 - 1991

T A H U N	E K S P O R		I M P O R		NILAI PERDAGANGAN (USD)	SALDO NERACA U/R.I. (USD)
	VOLUME (M.Ton)	NILAI FOB (USD)	VOLUME (M.Ton)	NILAI CIF (USD)		
1984	0	0	0	0	0	0
1985	1.266,2	425.705	3.128,8	601.153	1.206.858	- 175.448
1986	61.592,3	2.361.744	74,8	50.459	2.412.203	+ 2.311.285
1987	59.901,8	2.441.041	609,4	264.897	2.705.938	+ 2.176.144
1988	173.426,8	4.206.589	4.297,6	1.124.820	5.331.409	+ 3.081.769
1989	155.324,6	7.832.036	9.536,0	1.529.610	9.361.646	+ 6.302.426
1990	118.209,2	10.691.107	698,6	262.053	10.953.160	+ 10.429.054
1991 (Jan-Nop)	56.974,6	9.579.441	1.839,1	298.396	9.877.837	+ 9.281.045

Sumber : Biro Pusat Statistik (diolah).

Ekspor Indonesia ke Brunei Darussalam sudah meliputi sekitar 130 jenis komoditas. Tapi dalam volume dan nilai yang relatif masih rendah, sehubungan memang kecilnya jumlah konsumen di negeri itu, yang hanya berkisar sekitar 250.000 jiwa itu. Yang terpenting adalah :

- 1) Semen portland meliputi 103.000 ton senilai fob USD 4,0 juta.
- 2) Pakaian jadi pria dan anak laki2 sekitar 200 ton senilai USD 2,3 juta,
- 3) Pakaian jadi wanita dan produk2 tekstil lainnya senilai USD 1,0 juta lebih,
- 4) Kerupuk dan pasta kering sekitar 500 ton dengan nilai lebih dari USD 600.000,
- 5) Rokok kretek dan rokok lainnya sebanyak 75 ton senilai USD 600.000,
- 6) Barang2 dari plastik 30 ton senilai USD 100.000,
- 7) Air mineral sekitar 230 ton dengan nilai USD 80.000 - 100.000 per tahun,
- 8) Pelampung dan jaket penolong bagi pelaut sekitar 6 ton dengan nilai USD 100.000,
- 9) Sari buah dan juice seberat 120 ton dengan nilai USD 100.000 lebih,
- 10) Buah2an 20 ton senilai USD 75.000 dan lain2nya dalam volume dan nilai fob yang sangat kecil.

Gambar 3. Potongan artikel dan tabel yang menjelaskan perkembangan perdagangan bilateral Indonesia-Brunei Darussalam sejak tahun 1984 hingga 1991 dalam surat kabar Business News 10 Juni 1992

d. Dalam Bidang Pendidikan, Penerangan dan Lain-Lain

Melalui Menteri Pengajaran & Kesehatan Brunei Darussalam Awang Haji Abdul Aziz, pada tahun 1984 Brunei Darussalam berencana mengirimkan mahasiswa sarjana mereka untuk belajar di Indonesia khususnya dalam pendidikan kedokteran dan pendidikan agama. Alasan dikhususkan dalam pendidikan

kedokteran adalah untuk mempelajari secara mendalam mengenai penyakit-penyakit tropis. Selain itu juga Brunei ingin mengetahui cara-cara Indonesia menanggulangi dampak negatif budaya barat, penanggulangan penggunaan narkoba dan cara memperkokoh ideologi negara melalui pendidikan. Brunei Darussalam juga menerima sarjana Indonesia untuk mengajar di universitas-universitas Brunei Darussalam.

Selain mengirimkan para mahasiswa Brunei Darussalam belajar di Indonesia, Pemerintah Brunei Darussalam meminta bantuan Indonesia dalam meningkatkan pendidikan Islam di Brunei. Hal ini disampaikan Menteri Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam Ustad Haji Mohammad Zain bin Haji Serudin dalam kunjungan kehormatan kepada Presiden Suharto di Jalan Cendana pada bulan April 1987. Presiden Suharto menyatakan bersedia membantu Brunei Darussalam.

Langkah awal yang dilakukan Brunei Darussalam adalah mengirimkan para mahasiswa maupun lulusan sarjana mereka belajar Agama Islam lebih lanjut di Indonesia. Berdasarkan kunjungan Menteri Agama Indonesia Munawir Sjadzali ke Brunei Darussalam, Pemerintah Brunei Darussalam meminta bantuan Indonesia untuk mengajar di perguruan tinggi Islam dan studi kelayakan. Pada bulan Januari 1988 Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Ferdy Salim mengatakan bahwa Brunei berencana menggunakan pendidik Indonesia untuk membantu pendidikan Bahasa, Agama Islam dan Matematika di Brunei Darussalam. Perkembangan terakhir ialah pada 21 Maret 1988 dimana Pemerintah Brunei Darussalam menyambut baik rencana kerjasama pendirian Institut Agama Islam antara Indonesia dengan Brunei Darussalam di Brunei Darussalam (Antara, 1988a).

Selain dalam bidang Pendidikan, Pemerintah Indonesia dan Brunei juga melakukan kerjasama dalam bidang komunikasi yaitu saat kunjungan Menteri Penerangan Indonesia Harmoko ke Brunei Darussalam pada Februari 1989 disepakati bahwa kedua negara mempertimbangkan mengadakan acara "Salam Muhibah" antara Radio Republik Indonesia (RRI) dengan Radio Televisyen Brunei. Acara ini dimaksudkan untuk masyarakat Brunei dapat meminta lagu untuk disiarkan di RRI maupun sebaliknya. Salah satu pertimbangan diadakan acara tersebut adalah lagu-lagu Indonesia cukup diminati di Brunei Darussalam dan perlunya persatuan masyarakat ASEAN. Acara tersebut akhirnya diimplementasikan pada Maret 1989 dengan nama "Pilihan Pendengar Antara Indonesia dan Brunei" (N-1, 1989a, 1989b).

Indonesia dan Brunei Darussalam juga bekerjasama dalam sebuah prinsip yang disebut sebagai *Free and Balanced Flow Information* (FBFI). FBFI diperkenalkan pada tahun 1991 dengan memperhatikan kebebasan informasi dan arus informasi yang terjadi dalam kancah internasional kala itu. Dengan dasar tersebut diharapkan dalam bebasnya informasi yang tersebar dapat menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integrasi teritorial masing-masing negara serta tidak mencampuri urusan negara lain. Boleh dikatakan FBFI memiliki pertimbangan politik yang kuat yakni sebagai implementasi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN menurut Deklarasi Bangkok (N-1, 1991).

Dalam bidang lainnya, kerjasama yang terjalin juga dilakukan dalam bidang ketenagakerjaan yakni Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kontribusi TKI di Brunei mendominasi dalam bidang Asisten Rumah Tangga (ART), pekerja bangunan dan tenaga medis yang merupakan permintaan langsung dari Pemerintah Brunei Darussalam. Dalam ranah ART dan pekerja bangunan, TKI cukup diminati karena

kemudahan Bahasa dan persamaan agama. Namun terdapat kendala yang cukup besar dimana TKI masih kurang terdidik sehingga kalah saing dengan para tenaga kerja asing lainnya seperti Korea Selatan dan Taiwan. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah kurangnya peran Indonesia dalam bekerja sebagai tenaga ahli. Hingga pertengahan dekade 1990an kemampuan TKI sudah dianggap lebih baik daripada sebelumnya dan Indonesia perlu memperhatikan agar mengirimkan tenaga profesionalnya ke Brunei Darussalam (KC-14, 1988).

Kesimpulan

Indonesia dengan Brunei Darussalam sudah memiliki hubungan yang baik sejak masa kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara. Hubungan baik dapat terlihat dari jalur perdagangan, membayar upeti maupun pernikahan antar kerajaan. Hubungan baik ini sempat terhenti ketika Bangsa Eropa mulai mendominasi Nusantara hingga mengkolonisasi wilayah tersebut. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia berupaya menyebarkan semangat kemerdekaan kepada negara-negara yang masih terjajah khususnya Brunei. Namun karena kepentingan politik, Indonesia dibawah pimpinan Presiden Sukarno mendukung gerakan NKKU yang dipimpin oleh PM. Azahari tanpa mempertimbangkan Sultan Sir Omar Ali Saifuddin III sebagai pemimpin legal Brunei. Dampak dukungan Indonesia terhadap Azahari adalah hubungan dingin dengan Brunei.

Tahun 1967 menjadi tahun penting bagi kedua negara karena terjadi peralihan kepemimpinan. Sebagai pemimpin baru, Presiden Suharto dan Sultan Hassanal Bolkiah memiliki beberapa persamaan. Salah satu persamaannya adalah masa depan bangsa yang bergantung pada pembangunan dalam negeri. Persamaan pandangan itulah yang nantinya menjadi pertimbangan Brunei untuk bersahabat dengan Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984, Indonesia dan Brunei Darussalam memulai hubungan diplomatik yang resmi. Dengan berbagai kunjungan dan pertemuan resmi maupun tidak resmi menghasilkan kerjasama-kerjasama yang menguntungkan bagi kedua negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, penerangan dan pariwisata. Dalam kerjasama-kerjasama yang ada, bidang politik dan ekonomi merupakan bidang yang berkesan dalam hubungan diplomatik antara kedua negara.

Dalam bidang politik, kedua pemimpin negara sepakat untuk menjalankan hubungan diplomatik dengan semangat persahabatan dan persaudaraan yang kuat. Hubungan diplomatik yang baik ini berkesan dalam bidang ekonomi yakni bersedianya Brunei Darussalam untuk memberikan pinjaman lunak kepada Indonesia pada tahun 1987. Walaupun pada awalnya (dekade 1980an) Indonesia belum bisa bersaing dalam pasar Brunei untuk menjual komoditi-komoditi Indonesia dan belum bisa berkompetisi dalam hal ketenagakerjaan di Brunei, pada dekade 1990an Indonesia sudah mampu bersaing di pasar Brunei maupun berkompetisi dengan para tenaga kerja asing di Brunei. Bersedianya Brunei membantu Indonesia dalam menghadapi krisis moneter 1997-1998 juga menunjukkan semangat persaudaraan sesama serumpun untuk saling bekerjasama dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Dalam kerjasama pada bidang lainnya, terlihat bagaimana Brunei Darussalam memandang Indonesia sebagai Saudara Tua dimana Brunei banyak belajar dari Indonesia dalam berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan.

Referensi

- Abdulgani, R., & KNAPP. (2007). *Soeharto The Life And Legacy of Indonesia's Second President*. Kata Hasta Pustaka.
- AFP, ppg, osd, & ee. (1998, February 6). Presiden Bertemu Sultan Bolkihah. *Kompas*.
- Angkatan Bersenjata. (1987, September 11). Presiden Terima Sultan Hassanah Bolkihah: Brunei Darussalam Ingin Tingkatkan Kerjasama Ekonomi Dengan Indonesia. *Angkatan Bersenjata*.
- Antara. (1987). Brunei bantu Indonesia 100 juta Dollar AS dan bersedia tanam modal. In *Antara*.
- Antara. (1984). Brunei Berminat Pada Usaha Indonesia Kurangi Kebudayaan Barat. In *Antara*.
- Antara. (1987, September 11). Brunei Bersedia Beri Pinjaman 100 Juta Dollar AS Tanpa Bunga. *Kompas*.
- Antara. (1988). Pangeran Sambut Baik Kerjasama IAIN Di Brunei. In *Antara*.
- Antara. (1984). Pembicaraan Soeharto-Bolkihah. In *Antara*.
- Antara. (1987). Rombongan Sultan Brunei di Bali. In *Antara*.
- Antara. (1988). Tim Pariwisata Brunei: Penerbangan Merpati Perlu Didua Arahkan. In *Antara*.
- Antara. (1962, December 17). Presiden Soekarno Menegaskan: Rakjat RI Bersimpati Dg Perjuangan Brunei. *Kedaulatan Rakjat*.
- Antara, & Reuter. (1984, February 23). Hari ini, Perayaan Agung Kemerdekaan Brunei. *Pelita*.
- Anwar, D. F. (1988, December 17). Catatan Singkat Hubungan Indonesia-Brunei. *Kompas*.
- AS. (1988, April 5). Brunei Butuh Berbagai Komoditi Dari Indonesia. *Merdeka*.
- B-7. (1989, August 2). Presiden Ke Brunei. *Suara Pembaruan*.
- Brackman, A. C. (1966). *Southeast Asia's Second Front*. Pall Mall Press.
- Business News. (1992, June 9). Nilai Perdagangan R.I. Dengan Brunei Darussalam yang Ber-GNP Tertinggi Baru Mencapai USD 10 Juta Per Tahun. *Business News*.
- Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia (Ed.). (1963). *Indonesia 1963*. Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia.
- Haji Awang Mohd. Jamil Al Sufri. (1998). *Brunei Darussalam: The Road To Independence*. Brunei History Centre, Ministry of Culture, Youth and Sports.
- Hendrowinoto, N. K. S. (2015). *Ibu Negara Tien Suharto Dalam Percakapan Pers*. Yayasan Biografi Indonesia.
- Hendrowinoto, N. K. S. (2016). *Sultan H. Hassanah Bolkihah Brunei Darussalam Karunia Allah Dalam Percakapan Pers Indonesia*. Yayasan Biografi Indonesia.

- INU, SUT, IDR, & Dkk. (2008, January 15). Pemerintah Bantah Diskriminatif. *Kompas*.
- Karundeng, M. (1976, March 22). PBB Dukung Kemerdekaan Kesultanan Brunei. *Sinar Harapan*.
- Kassim, Y. R. (1987, September 11). Brunei offers Indonesia \$208m loans. *The Straits Times*.
- KC-14. (1988, February 15). Brunei Masih Perlukan Tenaga Kerja. *Suara Karya*.
- Kompas. (1989, May 24). Kendaraan Serba Guna. *Kompas*.
- Kompas. (1981, April 11). Kunjungan Sultan Brunei untuk Tingkatkan Kerjasama. *Kompas*.
- Kompas. (1998, February 26). Presiden dan Sultan Bolkiah Resmikan Gedung PKTSS-GNB. *Kompas*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Tiara Wacana.
- Lopez, A. da, & Suratno, J. (1984, February 22). Tamu Mulai Berdatangan Untuk Rayakan Hari Nasional Brunei. *Kompas*.
- Luhulima, J., & Setiadi, G. (1989, May 24). Kalau Anda Mau Menabung Tinggallah Di Brunei Darussalam. *Kompas*.
- Media Indonesia. (1998, January 6). Pemimpin Mancanegara Terus Berdatangan, Pak Harto Terima Sultan Bolkiah & Wakil PM Malaysia. *Media Indonesia*.
- Mingguan Djaja. (1962, December). Perdjoangan "The New Emerging Forces." *Mingguan Djaja*.
- N-1. (1989, February 6). Indonesia-Brunei Tingkatkan Kerjasama Bidang Komunikasi. *Suara Karya*.
- N-1. (1989, March 15). 19 Maret, "Pilihan Pendengar" Brunei-Indonesia Mulai Disiarkan. *Suara Karya*.
- N-1. (1991, March 13). Semakin Erat, Tali Hubungan Penyiaran Indonesia-Brunei. *Suara Karya*.
- Pelita. (1988, February 23). Hubungan Indonesia-Brunei Darussalam. *Pelita*.
- Pelita. (1992, October 7). Presiden Suharto Ajak Sultan Brunei Bantu Kerjasama Selatan-Selatan. *Pelita*.
- R-8. (1984, October 26). Pernyataan Bersama Suharto-Bolkiah: Hilangkan Sumber Ketegangan Dunia. *Pelita*.
- R-13. (1984, October 23). Persahabatan Yang Tulus RI-Brunei Akan Dapat Saling Menguntungkan. *Berita Yudha*.
- Republika. (1997, August 16). Brunei Berniat Beli lagi CN-235 Versi Militer. *Republika*.
- Republika. (1994). Hadiah Pak Harto untuk HUT Sultan Bolkiah. *Republika*.
- Rtr. (1998, January 26). Tabel: Perubahan Mata Uang Asia. *Kompas*.

- Sumadiria, A. H. (2017). *Jurnalistik Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media.
- Suryadinata, L. (2019). *Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soeharto*. LP3ES.
- Susan Lim. (1997, November 9). Brunei offers \$1.88 b in standby loan to Indonesia. *The Straits Times*.
- Sutopo, A. R. (1984, January 3). Brunei: Aktor Baru Di Asia Tenggara. *Suara Karya*.
- The Jakarta Post. (1992, October 5). Sultan of Brunei celebrates 25 year rule in grand style. *The Jakarta Post*.
- Tt. (1993, May 10). H. Awang bin Muhammad Jamil Al-Sufri: Penghubung Masa Lalu Brunei dan Jawa. *Kompas*.
- Unitary State of North Kalimantan (Ed.). (1965). *Bandung Spirit Aflames: Kalimantan Utara (North Kalimantan)*. Minister of Information Unitary State of North Kalimantan.
- Y. (1984, October 26). Komunike Bersama R.I.-Brunei: Kerjasama Ekonomi Setuju Ditingkatkan. *Merdeka*.
- Yusuf, Mukhlis, A., & Dkk. (2008). *Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto Dalam Berita Jilid XIX (1997)*. Antara Pustaka Utama.